

RS di Beijing Kewalahan Hadapi Gelombang Infeksi Covid-19

BEIJING (IM) - Rumah Sakit di Beijing dan beberapa kota besar Tiongkok berada di bawah tekanan yang sangat besar menyusul peningkatan kasus Covid-19. Dokter dan perawat dikhawatirkan dapat menuliri pasien karena mereka sendiri terpapar.

Pekerja medis garis depan tetap diperintahkan untuk bekerja karena kekurangan stafnya. Beijing sendiri melaporkan hanya 1.027 kasus baru pada Selasa (13/12) waktu setempat, namun skala kasus sebenarnya diyakini jauh lebih besar, dengan penduduk tidak lagi diharuskan melakukan tes PCR atau melaporkan hasil tes antigen mereka.

Seorang profesor Tiongkok yang berspesialisasi dalam kebijakan kesehatan telah memantau krisis di negara asalnya dari Universitas Yale di Amerika Serikat (AS). Chen Xi mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan direktur rumah sakit dan staf medis lainnya di Tiongkok tentang tekanan besar pada sistem saat ini.

Rumah sakit Tiongkok sejak pekan lalu meningkatkan kapasitas bangsal demam mereka untuk memenuhi gelombang besar pasien. Bangsal-bangsal tersebut kemudian telah terisi dengan cepat, meskipun ada pesan yang masih beredar bahwa "tidak apa-apa untuk tinggal di rumah jika Anda tertular virus".

Chen mengatakan masih banyak yang harus dilakukan untuk menjelaskan hal ini kepada orang-orang. "Tidak ada budaya tinggal di rumah

untuk gejala ringan," katanya. "Ketika orang merasa sakit, mereka semua pergi ke rumah sakit, yang dapat dengan mudah merusak sistem perawatan kesehatan," imbuhnya.

Serban apotek oleh para warga juga telah menyebabkan kekurangan obat yang signifikan di seluruh negeri. Banyak warga mencari obat pilek dan flu. Kit pengujian mandiri untuk Covid-19 juga sulit didapat.

Di Beijing, meskipun restoran diizinkan buka kembali, pelanggan mereka sangat sedikit dan jalanan sepi. Perusahaan memberitahu karyawan bahwa mereka harus kembali ke kantor, tetapi banyak yang tidak mau.

Beijing dan kota-kota besar lainnya mencoba secara bertahap untuk mengakhiri larangan perjalanan dan pembatasan lainnya serta mencoba hidup dengan virus. Pelonggaran aturan oleh pemerintah China ini menyusul protes massa menuntut pencabutan aturan ketat pemerintah atas kebijakan nol-Covid.

Protes meletus pada 25 November setelah 10 orang tewas dalam kebakaran di Urumqi, Xinjiang. Massa beropini penyebab kebakaran karena jedaan imbas dari aturan ketat Covid. Para korban yang ingin melancarkan diri maupun petugas pemadam kebakaran diblokir oleh pintu yang terkunci atau tindakan anti-virus lainnya.

Namun pihak berwenang membantahnya, meski tetap saja bencana tersebut menjadi fokus kemarahan publik. ● ans

Ukraina Butuh Dana Darurat 800 Juta Euro untuk Sektor Energi

PARIS (IM) - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan, negaranya memerlukan dana darurat sekitar 800 juta euro untuk sektor energinya. Hal itu disampaikan dalam sebuah konferensi bantuan internasional untuk Ukraina yang digelar di Paris, Prancis, Rabu (14/12).

Zelensky mengatakan, dia menyadari dana sebesar 800 juta euro yang dibutuhkan Ukraina untuk sektor energinya sangat tinggi. "Tapi biayanya lebih kecil daripada biaya pemadaman potensial. Saya harap keputusan (konferensi) akan dibuat sesuai," ucapnya.

Dia mengungkapkan, saat ini Ukraina membutuhkan trafo, peralatan untuk memperbaiki kabel listrik tegangan tinggi yang rusak, serta generator dan turbin gas. "Generator telah menjadi sama pentingnya dengan kendaraan lapis baja dan jaket antipeluru," ujar Zelensky.

Selain itu, Zelensky turut menyampaikan bahwa Ukraina membutuhkan pasokan dua miliar meter kubik gas untuk melewati musim dingin. "Karena penghancuran pembangkit listrik kami oleh serangan teror, kami perlu menggunakan lebih banyak gas musim dingin ini dari yang diperkirakan," katanya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna mengatakan, nega-

ra-negara dan lembaga donor yang berkumpul dalam konferensi di Paris telah menjanjikan bantuan senilai sekitar 1 miliar euro untuk membantu Ukraina selama musim dingin. "Ini adalah bantuan atau hadiah. Ini bukan pinjaman," ucapnya.

Dari 1 miliar euro yang dijanjikan, sekitar 400 juta di antaranya, akan dialokasikan untuk sektor energi Ukraina. "Kita tidak bisa meninggalkan mereka (Ukraina) sendirian menghadapi musim dingin, menghadapi agresor mereka yang berusaha menimbulkan kesulitan pada mereka," kata Colonna.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna mengatakan, nega-

Nasib Wakil Presiden Parlemen Eropa di Ujung Tanduk Usai Skandal Suap dari Qatar

BELGIA (IM) - Wakil Presiden Parlemen Eropa Eva Kaili sepertinya tinggal menunggu waktu di parlemen Eropa. Nasibnya di ujung tanduk usai dituduh menerima suap sebesar 1,5 juta euro (Rp25 miliar) dari Qatar.

Meski telah membantah terlibat dalam dugaan skandal suap yang melibatkan tuan rumah Piala Dunia Qatar di Parlemen Eropa, namun desakan agar dirinya dipecat terus berdatangan. Dikutip BBC, parlemen Eropa telah memilih - dengan 625 berbanding satu - untuk mencopot Kaili dari jabatannya sebagai salah satu dari 14 wakil presidennya.

Pemimpin parlemen Roberto Metsola telah berbicara tentang "hari-hari sulit bagi demokrasi Eropa". Metsola mengatakan menjelang pemungutan suara untuk mencopot Kaili dari peran utamanya di Parlemen, bahwa "demokrasi Eropa sedang diserang dan masyarakat kita yang bebas dan demokratis sedang diserang".

Dia dan Parlemen akan melakukan semua yang mereka bisa untuk memerangi korupsi. "Tidak akan ada impunitas, tidak akan ada penyisiran di bawah karpet," cuitnya pada Selasa (13/12).

Parlemen yang berada di Strasbourg, Prancis memberikan suara sangat banyak untuk mencopot Kaili dari perannya sebagai wakil presiden. Pintu kantornya di gedung parlemen disegel dengan pembertahanan bertulis "akses dilarang".

Dia juga telah diskors dari Kelompok Sosialis dan Demokrat parlemen dan dikeluarkan dari partai Pasok kiri-tengah Yunani.

Otoritas Yunani telah membekukan aset miliknya, suaminya, dan anggota keluarga dekat. Kegiatan perusahaan properti yang didirikan sekitar dua minggu lalu oleh MEP dan mitranya di Athena juga telah dibekukan.

Sementara itu, "watchdogs" dan MEP mengatakan penyelidikan suap bisa menjadi salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah parlemen.

Parlemen Eropa adalah satu-satunya lembaga yang dipilih langsung oleh Uni Eropa. Sekitar 705 anggota parlemen, yang dipilih oleh para pemilih di 27 negara yang tergabung dalam UE, bertemu untuk meneliti undang-undang yang diusulkan dan memberikan suara melalui hukum Eropa.

Parlemen menyatakan anggota parlemen umumnya menikmati kebebasan dari penuntutan, tetapi tidak dalam kasus di mana seorang anggota ditemukan melakukan pelanggaran. Berbicara dalam debat di Parlemen pada Selasa (13/12), Komisiner Urusan Dalam Negeri Uni Eropa Ylva Johansson mengatakan pada awalnya ada praduga tidak bersalah tetapi sekarang ini adalah penyelidikan kriminal yang serius karena melanggar kepercayaan orang-orang Eropa. ● gul



KONGRES NASIONAL KE-11 DI BEIJING

Wang Huning, anggota Komite Tetap Biro Politik Komite Pusat Partai Komunis Tiongkok (CPC), berbicara pada kongres nasional ke-11 di Beijing, Tiongkok, Selasa (13/12).

400 Orang Dijatuhi Hukuman Penjara 10 Tahun Terkait Protes di Iran

Lebih dari 14 ribu orang telah ditangkap di seluruh negeri sejak September.

TEHERAN (IM) - Pengadilan di dan sekitar ibu kota Iran, Teheran memenjarakan 400 orang atas tuduhan terkait protes belakangan ini. Adapun hukuman yang dijatuhkan hingga 10 tahun penjara.

Kepala Kehakiman Teheran Ali Alghasi-Mehr mengatakan, hakim telah menjatuhkan putusan kepada "perusuh." Istilah perusuh digunakan pejabat untuk semua demonstran yang menentang aturan teokratis garis keras Iran.

"160 orang dijatuhi hukuman antara lima dan 10 tahun penjara, 80 orang hingga dua hingga lima tahun dan 160 orang hingga dua tahun," kata

Alghasi-Mehr di situs web pengadilan Mizan Online, dikutip laman Guardian, Rabu (14/12).

Teheran adalah salah satu dari 31 provinsi di Iran, yang berarti jumlah hukuman penjara kemungkinan akan beberapa kali lebih tinggi. Pakar hak asasi manusia PBB memperkirakan bahwa lebih dari 14 ribu orang telah ditangkap di seluruh negeri sejak pertengahan September.

Gerakan aksi protes dipicu oleh kematian Mahsa Amini, seorang wanita Kurdi-Iran yang diduga dipukuli hingga koma oleh polisi moral karena mengenakan jilbabnya dengan cara yang salah. Tapi sejak itu,

aksi protes berubah menjadi pemberontakan sipil terbesar selama bertahun-tahun.

Warga Iran mengungkapkan kemarahan mereka selama beberapa dekade penindasan, misogini atas nama agama, dan isolasi internasional. Pihak berwenang telah menanggapi para pemrotes damai dengan kekerasan, menembaki dan memukul pungguk rasa. Kantor komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia mengatakan lebih dari 300 orang tewas dalam tindakan keras itu, termasuk sedikitnya 40 anak-anak.

Dalam upaya mencegah protes masa meluas lagi, Iran memadamkan internet. Iran juga mempublikasikan hukuman berat yang dijatuhkan oleh pengadilan, termasuk 11 hukuman mati, dua diantaranya telah dilaksanakan.

Pada Senin, pihak berwenang menggantung seorang pria berusia 23 tahun dari derek konstruksi setelah perisidangan yang tergesa-gesa dan rahasia. Majidreza Rahnavard dituduh membunuh dua pejuang militansi pro-rezim. Dia dieksekusi di depan umum, tangan dan kakinya diikat dan sebuah tas hitam diletakkan di atas kepalanya. Kamis pekan lalu, pihak berwenang juga menggantung Mohsen Shekari, yang dihukum karena melukai seorang penjaga keamanan dengan pisau.

Wakil direktur Amnesty International untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Diana Elthawy mengatakan pembunuhan itu menunjukkan bahwa pengadilan Iran adalah alat represi yang mengirim individu ke tiang gantungan untuk menyebarkan ketakutan

dan menuntut balas dendam pada penguji rasa yang berani melawan status quo.

Amnesty yakin 20 orang lagi berisiko dieksekusi atas dugaan pelanggaran sehubungan dengan protes. Namun, para aktivis Iran khawatir bahwa cepatnya orang dijatuhi hukuman mati berarti berisiko serius adanya eksekusi massal.

Pesepakbola profesional Iran Amir Nasr-Azadani, menghadapi eksekusi setelah mengkampanyekan hak-hak perempuan dan kebebasan dasar di negaranya. Serikat sepak bola internasional Fifpro mengatakan keterkejutannya dan muak tentang laporan eksekusi Amir Nasr-Azadani tersebut.

"Kami berdiri dalam solidaritas dengan Amir dan menyerukan agar hukumannya segera dicabut," kata Fifpro. ● tom

PBB Sebut Suriah Butuh Bantuan Kemanusiaan yang Mendesak

NEW YORK (IM) - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres memperingatkan, situasi kemanusiaan yang sudah mengherikan di Suriah semakin memburuk. Jika pengiriman bantuan dari Turki ke wilayah barat laut Suriah yang dikuasai pemberontak tidak diperbarui bulan depan, maka jutaan warga Suriah mungkin tidak dapat bertahan di musim dingin.

Dalam laporan kepada Dewan Keamanan PBB, Guterres mengatakan, bantuan lintas batas ke barat laut tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari operasi kemanusiaan untuk menjangkau semua orang yang membutuhkan. Pengiriman bantuan melintasi garis konflik di dalam negeri telah meningkat. Tetapi Guterres mengatakan, mereka tidak dapat menggantikan ukuran atau ruang lingkup operasi bantuan besaran lintas batas PBB.

Guterres mengatakan, setidaknya 374 proyek bantuan kemanusiaan telah berlangsung di Suriah sejak Januari. Bantuan ini secara langsung menguntungkan lebih dari 665.000 orang. Tetapi menurut Guterres mengatakan, perlu perluasan proyek bantuan lebih lanjut.

Dewan Keamanan PBB meminta laporan dari sekretaris jenderal tentang kebutuhan kemanusiaan Suriah untuk memperpanjang pengiriman makanan, obat-obatan, dan bantuan lain yang sangat dibutuhkan melalui penyeberangan Bab al-Hawa dari Turki ke barat laut Idlib selama enam bulan hingga 10 Januari.

Pada Juli 2020, Cina dan Rusia memveto resolusi PBB yang akan mempertahankan dua titik penyeberangan perbatasan dari Turki untuk bantuan kemanusiaan ke barat laut Idlib. Beberapa hari kemudian, pengiriman bantuan dikurangi menjadi hanya penyeberangan Bab al-Hawa selama satu tahun seperti yang mereka minta.

Pada Juli 2021, Rusia mendesak pengurangan lebih lanjut, akhirnya menyetujui perpanjangan enam bulan bergantung pada laporan dari sekretaris jenderal tentang kemajuan pengiriman lintas batas. Tetapi pada bulan Juli tahun ini, Rusia bersikeras bahwa otorisasi PBB hanya berlangsung selama enam bulan.

Guterres mengatakan, ban-

tuan lintas batas tetap menjadi garis hidup bagi jutaan orang. Pembaharuan resolusi Dewan Keamanan PBB, Guterres mengatakan, situasi kemanusiaan yang sudah mengherikan lanjut tidak hanya bersifat kritis, tetapi merupakan keharusan moral dan kemanusiaan.

Menurut laporan Guterres sebanyak 7,5 juta orang tinggal di daerah yang tidak berada di bawah kendali pemerintah Suriah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6,8 juta di antaranya membutuhkan bantuan kemanusiaan karena permusuhan dan perpindahan yang meluas.

"Setelah 11 tahun konflik, negara ini masih memiliki jumlah pengungsi internal terbesar di dunia, mendorong salah satu krisis pengungsi terbesar di dunia, dan situasi kemanusiaan terus memburuk," ujar Guterres.

Situasi yang sudah mengherikan ini diperparah dengan penyebaran kolera di seluruh negeri, pandemi Covid-19, ekonomi dan iklim yang memburuk. Termasuk guncangan lain yang disebabkan oleh manusia.

"Akibat dari tantangan tersebut, pada tahun 2023, 15,3 juta orang dari total populasi 22,1 juta diperkirakan membutuhkan bantuan kemanusiaan, dibandingkan dengan 14,6 juta orang pada tahun 2022. Ini adalah tingkat tertinggi orang membutuhkan bantuan kemanusiaan sejak awal konflik pada tahun 2011," kata Guterres.

Data tentang kebutuhan kemanusiaan yang dikumpulkan oleh PBB dan mitranya menunjukkan, pada Juli dan Agustus sekitar 85 persen dari total 34.000 rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jumlah tersebut meningkat dari 2021 yang mencapai 75 persen.

Laporan tersebut juga mengutip peningkatan kekurangan gizi akut yang diderita anak usia 6 bulan hingga 5 tahun pada tahun 2022 sebesar 48 persen. Setidaknya 25 persen anak di bawah usia lima tahun di beberapa kabupaten terhambat pertumbuhannya, dan berisiko mengalami kerusakan permanen pada perkembangan fisik dan kognitif. Termasuk infeksi berulang, keterlambatan perkembangan, kecacatan dan kematian. ● gul

Selandia Baru Sahkan UU Larangan Rokok untuk Generasi Mendatang

SELANDIA BARU (IM) - Selandia Baru akan menerapkan undang-undang larangan tembakau secara bertahap mulai tahun depan.

Undang-undang (UU) yang disahkan oleh parlemen pada Rabu (14/12) ini berarti siapa pun yang lahir setelah 2008 tidak akan pernah bisa membeli rokok atau produk tembakau.

Artinya, jumlah orang yang mampu membeli tembakau akan menyusut setiap tahunnya. Pada 2050, misalnya, usia 40 tahun akan terlalu muda untuk membeli rokok.

Menteri Kesehatan Ayesha Verrall, yang memperkenalkan UU itu, mengatakan itu adalah langkah "menuju masa depan yang bebas asap rokok".

"Ribuan orang akan hidup lebih lama, hidup lebih sehat dan sistem kesehatan akan menjadi 5 miliar dolar Selandia Baru (Rp50 triliun) lebih baik karena tidak perlu mengobati penyakit akibat merokok," terangnya.

Menurut statistik pemerintah yang dirilis pada November lalu, tingkat merokok Selandia Baru sudah mencapai titik terendah dalam sejarah, dengan hanya 8% orang dewasa yang merokok setiap hari. Angka ini turun dari 9,4% pada tahun lalu.

Diharapkan bahwa UU Lingkungan Bebas Rokok akan mengurangi angka tersebut menjadi kurang dari 5% pada 2025, dengan tujuan akhir untuk menghilangkan praktik tersebut sama sekali.

UU itu juga dirancang untuk membatasi jumlah pengecer yang dapat menjual produk tembakau asap hingga 600 di seluruh negeri - turun dari 6.000 saat ini - dan mengurangi kadar nikotin dalam produk untuk mengurangi kecanduan.

"Itu berarti nikotin akan dikurangi ke tingkat non-adiktif dan masyarakat akan bebas dari proliferasi dan pengelompokan pengecer yang menargetkan dan menjual produk tembakau

di wilayah tertentu," lanjutnya.

Dia menambahkan bahwa undang-undang tersebut dapat menutup harapan hidup antara warga Maori dan non-Maori. Tingkat merokok keseluruhan untuk warga Maori adalah 19,9% - turun dari angka tahun lalu sebesar 22,3%.

Undang-undang baru ini tidak melarang produk vape, yang menjadi jauh lebih populer di kalangan generasi muda daripada rokok.

Sementara itu, para pengkritik UU tersebut - termasuk partai ACT yang memegang 10 kursi di parlemen - telah memperingatkan bahwa kebijakan tersebut dapat memicu pasar gelap produk tembakau dan mematikan toko-toko kecil.

"Tidak ada yang mau melihat orang merokok, tapi kenyataannya, kemauan dan larangan pengasuh negara dari Partai Buruh akan menimbulkan masalah," ujar Wakil Ketua ACT Brooke van Velden. ● ans



BURSA KERJA PERUSAHAAN TIONGGOK

Pelajar mengunjungi bursa kerja perusahaan Tiongkok, di Nairobi, Kenya, Selasa (13/12). Perusahaan Tiongkok menggelar bursa kerja selama dua hari di Kota Kenya, Nairobi, menawarkan sekitar 300 peluang bagi pelajar Kenya.